



Rencana Kerja 2027

INSPEKTORAT

**Jalan Jendral Ahmad Yani
Nomor 32 Temanggung
56213**

**Telepon (0293) 492422
Faksimile (0293) 491040**



HALAMAN VERIFIKASI

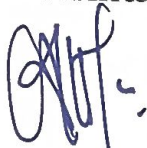
**RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

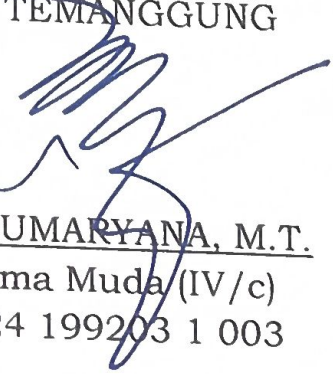
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan PemerintahanEWIEK KHAVIDA, S.STP, M.M
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,

TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199707072020081003

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, 15 Juli 2026


 INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG

II KRISTRI WIDODO, M.Si,
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	39
2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD	42
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	66
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	66
2.8 Penghargaan	68
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	69
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	92
4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung	89
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
5.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2027	96
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	96
BAB VI PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2026	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.5 Telaah Pokok Pikiran DPRD	45
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	46
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Inspektorat Kabupaten Temanggung	66
Tabel 2.8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah	66
Tabel 2.9 Daftar Penghargaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	68
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027	70
Tabel 3.2. Rencana dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2027	74
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung tahun 2027	93
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	96
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	97

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2029 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

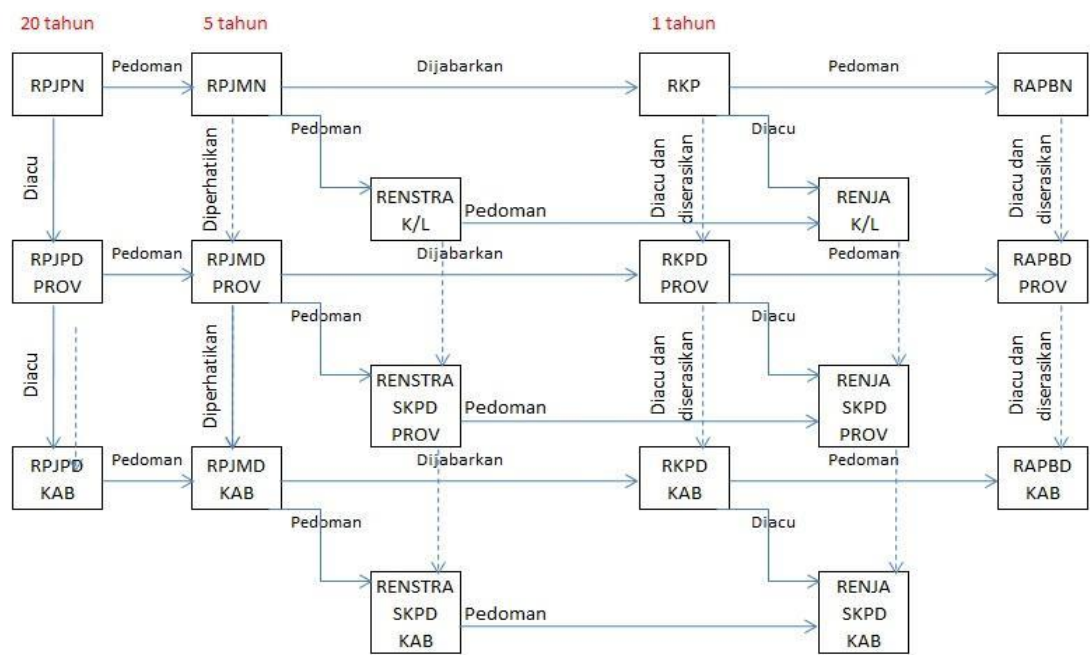
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Inspektorat Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan Inspektorat;

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi Tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu

pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat;

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan

dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- 23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat . Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- 2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2027;
- 3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2027;
- 4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Inspektorat Tahun 2027; dan
- 5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
BAB	III	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VI	PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029**

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Inspektorat 2025-2029 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d Tahun 2026
Kabupaten Temanggung

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realiasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
6.01	PENGAWASAN							23.121.405.72 2		2.237.476.4 01	
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	100		100	14.321.405.72 2	100	2.218.174.9 01	100
6.01.01.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-		-	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								
601012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	Dokumen				51/12	8.173.442.840		2.180.283.0 50	
601012.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	58	58	100	58	8.073.442.840	58	2.177.647.0 50	100

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601012.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	100	12	100.000.000	3	2.636.000	25
6.01.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen								
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		orang				58	2.800.000.000		-	
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	78	78	100	58	2.800.000.000	3	-	5,17
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5 Kegiatan	1.635.483.600		11.689.928	
601012.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100	12	50.000.000	3		25,00
601012.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	200.000.000	1	126.000	8,33

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realiasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601012.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	220.000.000	1	102.000	8,33
601012.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	12	200.000.000	5	1.209.800	41,67
601012.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	12	965.483.600	2	10.252.128	16,67
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		unit				33	650.000.000	3	-	4
601012.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	1	1	100	0		0		
601012.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	31	31	100	31	100.000.000	0		0,00
601012.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	34	97	35	400.000.000	3		8,57

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601012.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100	16	150.000.000	0		0,00
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	9	9		48	163.162.882	8	12.978.280	
601012.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	30.000.000	5	215.500	41,67
6.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	100	12	10.000.000	0		0,00
601012.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	75.000.000	0		0,00
601012.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	48.162.882	3	12.762.780	25,00
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104	899.316.400	8	13.223.643	46,05

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realiasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601012.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	23	164	14	300.000.000	5	12.165.543	35,71
601012.09.5	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	29	14	48	29	25.000.000	3		10,34
601012.09.6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	61	19	31	61	100.000.000	-	1.058.100	0,00
6.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	3	3	100	3	474.316.400	0		0,00
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan						13	5.050.000.000		12.165.500	
		Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I. II. III.IV. Khusus)	Persen	100	100	100	100		13,29		13,29

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realiasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
		Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persen	100	100	100	100		100		100,00
		Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	100	100	100		100		100,00
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Laporan dan Dokumen					3.850.000.000		11.342.000	
601022.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	3	3	100	3	350.000.000	0	573.500	0,00
601022.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan				1	696.824.000	1	600.000	100
601022.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	120	121	101	120	1.000.000.000	1	1.219.500	0,83
601022.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	61	138	226	61	303.176.000	12		19,67
601022.01.5	Pengawasan Desa	Jumlah Hasil pengawasan Desa	Laporan	45	61	136	45	500.000.000	10	2.825.500	22,22
601022.01.7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Dokumen	85	85	100	85	1.000.000.000	10	6.123.500	11,76

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realiasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan				13	1.200.000.000	8	823.500	525
601022.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian kerugian Negara	Laporan	1	1	100	1	600.000.000	5	0	500,00
601022.02.2	Pengawasan dgn Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	16	133	12	600.000.000	3	823.500	25,00
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							3.750.000.000		7.136.000	
		Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100		0		0,00
		Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persen	100	100	100	100		0		0,00
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Persen	100	100	100	100		23,91		23,91
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Persen	100	100	100	100		100		100,00

KODE	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s.d tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisa si Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisa si (%)	Target Renstra		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW 1 2026		Tingk at Capai an
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Rekomendas i	1	1		1	850.000.000	-	-	-
601032.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendas i	1	1	100	1	850.000.000	-		0
601032.02	Pendampingan dan Asistensi		PD dan kegiatan					2.900.000.000	37 dan 4	7.136.000	26
601032.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	48	69	144	48	1.300.000.000	1	1.128.500	2,08
601032.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	7	26	371	7	1.000.000.000	2		28,57
601032.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	46	46	100	46	600.000.000	11	6.007.500	23,91

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan I Tahun 2026

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - j. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - k. Pengadaan Mebel;
 - l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - o. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - r. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - s. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - t. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP;
 - u. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - v. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
 - w. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
 - x. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2. Realisasi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas /kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Pengawasan Desa;
 - e. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
 - f. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan
 - g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pendampingan dan Asistensi;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan mebel;
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
4. Faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dikarenakan sub kegiatan targetkan untuk persediaan pemeliharaan semua asset, namun pada saat pelaksanaan tidak semua asset memerlukan pemeliharaan, sedangkan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya anggaran yang dialokasikan untuk pembelian tidak mencukupi (terkendala kenaikan harga).
 - b. Faktor penyebab realisasi target kinerja melebihi target dikarenakan bertambahnya obyek pemeriksaan dari yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Program penyelenggaraan pengawasan pada Triwulan I tahun 2026 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengawasan yang direncanakan dilaksanakan selama satu tahun baru dapat dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2026, sehingga baru sebagian rencana pengawasan yang dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan pengawasan pada Triwulan I. Namun pada Triwulan IV diproyeksikan akan mencapai target karena pengawasan yang diwajibkan sampai akhir tahun dapat dilaksanakan semua. Sehingga hal tersebut membantu ketercapaian pada target Renstra maupun Renja.
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut yaitu penyebab dari kenaikan harga akan dievaluasi kembali dengan mengajukan Standar

Satuan Harga pada saat perubahan anggaran. Dengan demikian perubahan harga dapat disesuaikan dalam DPA perubahan sesuai dengan harga pasar dan diharapkan capaian kinerja tetap bisa tercapai.

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan **sangat tinggi**, dari 12 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung capaian dalam kategori sangat tinggi sebanyak 11 indikator kinerja, dan 1 indikator kinerja dengan kategori sedang.

Sedangkan realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tercapai 44,95% dari Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.22.550.827.592,- terserap sebesar Rp.10.136.173.268,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.12.414.654.325,- atau sebesar 55,05%.

Hal tersebut didukung dengan tercapainya indikator sasaran :

1. Meningkatnya pengawas Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan indikator Nilai Kapabilitas APIP;
2. Nilai Kapabilitas APIP dengan indicator kinerja Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator :
 - a. Indeks kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah;
 - b. Nilai AKIP Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat dibagi menjadi Indikator kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2-2.5 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Penilaian Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN									
BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	80,00	81,00	82,00	91,59	91,59	100,00	Sangat Tinggi
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	79,00	80,00	78,15	78,15	98,92	Sangat Tinggi
Inspektorat Daerah									
3	Maturitas SPIP	Angka	3,1	3,125	3,15	2,979	2,979	95,33	Sangat Tinggi
4	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,001	3,003	3,006	2,42	2,42	80,59	Tinggi
5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	3,001	3,003	3,006	2,91	2,91	96,90	Sangat Tinggi
INDIKATOR PROGRAM									
Program Penyelenggaraan Pengawasan									
1	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III.IV. Khusus)	%	100	100	100	100	13,28	13,29	Sangat Rendah
2	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi									
4	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	%	100	100	100	100	0	0	Sangat Rendah
5	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100	100	66,67	0	0,00	Sangat Rendah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Penilaian Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	100	100	100	23,91	23,91	Sangat Rendah
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Skala Penilaian Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN									
BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH									
	NIHIL								

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026
			2025	2026	2027	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN								
BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	2	2	66,67%
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	2	2	66,67%
3	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja semua indikator mencapai peringkat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai IKM Perangkat Daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - a. SDM yang terampil dan motivasi kerja yang tinggi;
 - b. Adanya pelatihan bagi SDM guna peningkatan ilmu pengetahuan dan memberi pelayanan terbaik;
 - c. Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan pelayanan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai (keterbatasan fasilitas dan ruang merokok);
 - b. Informasi pelayanan yang belum diketahui perangkat daerah;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
 - a. Memperbiki sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan;
 - b. Mengirim peserta untuk mengikuti diklat, workshop terkait pelayanan publik baik secara daring maupun tatap muka;
 - c. Mengusulkan anggaran guna pemenuhan sarpras dan pelatihan pegawai
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik
 - b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain

(crosscutting)

- b. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
- c. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai laporan kinerja

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut Adalah :

- a. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan menambahkan informasi crosscutting;
- b. Mendokumentasikan rapat capaian monev triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh inspektur;
- c. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan kinerja;

3. Maturitas SPIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah :

- a. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
- b. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
- c. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Ling. ungan pemkab Temanggung;
- d. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
- e. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

2). Faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- a. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
- d. Terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang

- e. Adanya perubahan metode pengujian yang mengarah pada perubahan kebijakan penilaian SPIP

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- a. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- b. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
- d. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

4. Nilai Kapabilitas APIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah :

- a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
- b. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
- c. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;
- d. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
- e. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;

- f. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
- g. Melakukan revidu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
- h. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
- i. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
- j. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

2) Faktor Penghambat tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya:

- a. kompetensi SDM belum memadai
- b. kuantitas SDM belum memadai
- c. kurangnya komitmen
- d. kurangnya komunikasi
- e. anggaran belum memadai
- f. perencanaan kegiatan belum memadai, (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
- g. Adanya regulasi baru Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan cara pengukuran Kapabilitas APIP sehingga menyebabkan level Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia mengalami penurunan secara angka, tetapi meningkat secara kualitas

3) Upaya yang dilakukan dalam rangka Level Kapabilitas APIP diantaranya :

- a. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi

Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;

- b. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
- c. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
- d. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- e. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
- f. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;

5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1). Faktor Pendorong tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

- a. Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK;
- b. Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
- c. Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi;
- d. Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system;
- e. Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang.

2) Faktor Penghambat tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

- a. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
 - b. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
 - c. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
 - d. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
 - e. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
 - f. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya:
- a. Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
 - b. Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - a. Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.

B. INDIKATOR PROGRAM

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program pada Inspektorat kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja semua indikator mencapai peringkat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III. IV. Khusus)
 - 1) Faktor Pendukung tercapainya indikator kinerja :

- a. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku untuk menjamin independensi.
 - b. Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan
 - c. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan
 - d. Sinergi yang baik dengan lembaga pengawasan lain (seperti BPK, BPKP, KPK) dan penegak hukum
- 2). Faktor penghambat tercapaian indikator kinerja :
- a. Pengawasan masih dilaksanakan secara manual
 - b. Kurangnya tenaga teknis (tenaga IT yang mendukung pengelolaan sistem pengawasan digital dan fisik bangunan)
 - c. Adanya tugas tambahan dari pemerintah pusat atau kementerian yang mengubah prioritas pengawasan
 - d. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah audit yang diperiksa
 - e. Kompetensi auditor belum memadai dalam menggunakan audit berbasis teknologi
- 3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :
- a. Diperlukan peningkatan auditor baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - b. Diperlukan penyesuaian jadwal pengawasan agar dapat melaksanakan mandatori pusat tanpa mengurangi rencana pengawasan yang sudah direncanakan dalam PKPT
2. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
- 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator :
- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
 - c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;

- d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator :

- a. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- b. Temuan pemeriksaa terkait kebijakan lama tidak dilanjutkan dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- c. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
- d. SDM APIP kurang/terbatas

3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

- a. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
- b. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
- c. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan.

3. Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang matang dan terukur
- b. Peningkatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih
- c. Penguatan SDM dan Anggaran
- d. Regulasi kuat terhadap fungsi Inspektorat/Irbansus
- e. Sistem penganggaran yang memadai

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja

- a. Kurangnya komitmen darisebagian unit kerja/perangkat daerah

- b. Kegiatan baru atau regulasi baru yang belum sepenuhnya dipahami
 - c. Mutasi pegawai / perubahan organisasi yang mengganggu rutinitas
 - d. Keterlambatan dokumen atau data yang diperlukan untuk pengawasan
 - e. Regulasi atau prosedur yang belum berjalan secara konsisten
 - f. beban administrasi dan tuntutan pelaporan yang cukup tinggi
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
- a. Penguatan perencanaan dan focus strategi
 - b. Optimalisasi pemantapan anggaran
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan perkuat monitoring
 - d. Peningkatan sistim komunikasi, publikasi dankolaborasi dengan pihak-pihak terkait;
 - e. Tindak lanjut rekomendasi yang berkesinambungan
4. Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan
- 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Adanya Tim Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT)
 - c. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
- 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sering terlambat terbit sehingga pedoman perumusan kebijakan teknis pengawasan (PKPT) masih menggunakan Permendagri tahun sebelumnya
 - b. Masih kurangnya pemahaman Tim Penyusun Kebijakan Teknis pada penyusunan PKPT Berbasis Risiko

- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Prov Jawa Tengah terkait pedoman yang digunakan untuk penyusunan kebijakan teknis pengawasan (PKPT)
 - b. Tim Inti Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT) lebih aktif dan intensif dalam bekerja
 - c. Konsultasi dengan BPKP apabila ada kendala dalam penyusunan
5. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - 1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja
 - a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - b. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
 - c. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
 - 2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja
 - a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - c. Adanya mutasi pegawai
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
 - a. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas
 - b. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - c. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI

6. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya

1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja

Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja

Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko

3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah

7. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi

1) Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja

a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;

b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;

c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;

d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,

e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;

f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja

a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;

b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;

c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;

d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,

- e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja
- a. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - b. Sosialisasi benturan kepentingan;
 - c. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

C. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai pemegang Urusan Pemerintah Bidang urusan Inspektorat Daerah tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tabel berisi nihil.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 dari tiga indikator baru satu indikator tercapai 100%, sedangkan 2 yang lain tercapai 66,6%, sebagaimana rincian berikut :

1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - a. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
 - b. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
 - c. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Ling. ungan pemkab Temanggung;
 - d. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
 - e. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng
 - 2). Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;

- b. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
 - d. Terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang
 - e. Adanya perubahan metode pengujian yang mengarah pada perubahan kebijakan penilaian SPIP
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- a. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - b. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - c. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
 - d. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD
2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai Kapabilitas APIP
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut Adalah :
- a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
 - b. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
 - c. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan

kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;

- d. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
- e. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;
- f. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
- g. Melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
- h. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
- i. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
- j. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

2) Faktor Penghambat tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya:

- a. kompetensi SDM belum memadai
- b. kuantitas SDM belum memadai
- c. kurangnya komitmen
- d. kurangnya komunikasi
- e. anggaran belum memadai
- f. perencanaan kegiatan belum memadai, (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
- g. Adanya regulasi baru Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan

adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan cara pengukuran Kapabilitas APIP sehingga menyebabkan level Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia mengalami penurunan secara angka, tetapi meningkat secara kualitas

3) Upaya yang dilakukan dalam rangka Level Kapabilitas APIP diantaranya :

- a. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
- b. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
- c. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
- d. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- e. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
- f. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;

3. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1

1) Faktor Pendorong tercapainya indikator :

- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;

- d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

2) Faktor Penghambat tercapainya indikator :

- a. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- b. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama tidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- c. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
- d. SDM APIP kurang/terbatas

3) Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja

- a. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
- b. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
- c. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2026 dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan Inspektorat sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu :

1) Nilai AKIP Perangkat Daerah (98,92%)

Capaian kinerja nilai AKIP Triwulan I tahun 2026 masih

menggunakan hasil penilaian Tahun 2025 atas pelaksanaa kinerja Tahun 2024, dikarenakan evaluasi AKIP Tahun 2025 belum dilaksanakan.

Hal ini disebabkan karena :

- a. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting)
- b. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
- c. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai laporan kinerja

2) Maturitas SPIP (95,33%)

Hal ini disebabkan :

- a. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
- d. Terbitnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang
- e. Adanya perubahan metode pengujian yang mengarah pada perubahan kebijakan penilaian SPIP

3) Nilai Kapabilitas APIP (90,59%)

Hal ini disebabkan karena :

- a. kompetensi SDM belum memadai
- b. kuantitas SDM belum memadai
- c. kurangnya komitmen

- d. kurangnya komunikasi
 - e. anggaran belum memadai
 - f. perencanaan kegiatan belum memadai, (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
 - g. Adanya regulasi baru Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan cara pengukuran Kapabilitas APIP sehingga menyebabkan level Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia mengalami penurunan secara angka, tetapi meningkat secara kualitas
- 4) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (96,90%)
- a. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
 - b. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
 - c. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
 - d. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
 - e. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
 - f. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan.
- 5). Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan (PKPT) pada Irban (I. II. III.IV. Khusus) (13,29%)
- Hal ini disebabkan karena
- a. Pengawasan masih dilaksanakan secara manual
 - b. Kurangnya tenaga teknis (tenaga IT yang mendukung pengelolaan sistem pengawasan digital dan fisik bangunan)
 - c. Adanya tugas tambahan dari pemerintah pusat atau kementerian yang mengubah prioritas pengawasan

- d. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah audity yang diperiksa
 - e. Kompetensi auditor belum memadai dalam menggunakan audit berbasis teknologi
- 6). Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan (0%)

Hal ini disebabkan karena :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sering terlambat terbit sehingga pedoman perumusan kebijakan teknis pengawasan (PKPT) masih menggunakan Permendagri tahun sebelumnya
 - b. Masih kurangnya pemahaman Tim Penyusun Kebijakan Teknis pada penyusunan PKPT Berbasis Risiko
- 7). Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (0%)

Hal ini disebabkan karena :

- a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - c. Adanya mutasi pegawai
- 9). Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya (23,91%)

Hal ini disebabkan karena Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen Risiko.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Temanggung, antara lain:

- a. Pencegahan Korupsi belum optimal;
- b. Belum semua PD memahami pengelolaan resiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
- c. Nilai IEPK belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman arti pentingnya penegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola,

- peningkatan efektivitas manajemen Risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di PD sehingga masih perlu diadakan pendampingan;
 - e. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah (SD, SMP) sehingga perlu di reviu;
 - f. Masih banyak laporan keuangan desa belum sesuai peraturan yang berlaku;
 - g. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - h. Masih banyak aduan yang masuk ke inspektorat;
 - i. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (terutama desa);
 - j. Baru ada 2 (dua) Perangkat Daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari kementrian PAN dan RB;
 - k. Masih adanya aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat (Gratifikasi, Wistle Blowing System dan Benturan Kepentingan);
 - l. Kualitas, kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban tugas dan kewenangannya;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain :
- a. Tata kelola pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
 - b. pengawasan berjalan kurang optimal yang mengakibatkan meningkatnya celah korupsi, menurunnya tata Kelola keuangan daerah yang juga mengakibatkan penurunan opini audit dari badan pemeriksa Keuangan.
 - c. Terhambatnya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (clean government).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung, antara lain :
- a. Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menyelenggarakan pengawasan internal antara lain :
 - Jumlah auditor dan P2UPD tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diawasi.;

- Tuntutan penguasaan teknologi, seperti audit sistem informasi dan analisis *big data*, memerlukan peningkatan keterampilan terus-menerus.
- Tekanan politis atau birokrasi yang terkadang mengganggu independensi Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan objek secara objektif.
- Masih adanya pandangan bahwa pemeriksaan Inspektorat adalah pencari kesalahan, sehingga pendekatan pembinaan sulit diterapkan.

b. Peluang yang mendukung Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain:

- Adanya mandat digitalisasi pemerintah serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memudahkan integrasi data pengawasan;
- Pergeseran Paradigma APIP, Tren pengawasan internal berubah dari sekadar mencari kesalahan (*audit*) ke arah konsultatif dan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) yang membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai target kinerjanya;
- Adanya peluang rekrutmen dan diklat terstandar bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan
- Partisipasi Publik melalui Pemanfaatan saluran pengaduan digital oleh masyarakat yang dapat dijadikan bahan tindak lanjut pengawasan.

5. Formulasi isu-isu penting

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 secara maksimal maka berdasarkan permasalahan yang ada strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP dan kompetensi;
2. Penguatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Efektifitas pelaksanaan pengawasan;

- 5. Mendorong keterlibatan publik dan penguatan budaya antikorupsi;
- 6. Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawsan;serta
- 7. Meningkatkan kerjasama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Inspektorat			
	NIHIL		

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2026

2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Dari hasil telaah terdapat selisih sebesar Rp.8.073.442.840,- dari rancangan awal RKPD Rp.15.047.962.884,- dan hasil Analisa kebutuhan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2027 Rp.23.121.405.724,-. Besaran selisih tersebut merupakan pagu anggaran Sub Kegiatan gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Inspektorat					15.047.962.884
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					15.047.962.884
	INSPEKTORAT DAERAH					15.047.962.884
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	6.247.962.884
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	46	Dokumen dan Laporan	2.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Inspektorat					23.121.405.724,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					23.121.405.724,00
	INSPEKTORAT DAERAH					23.121.405.724,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	14.321.405.724,00
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan	46	Dokumen dan Laporan	2.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Kinerja Perangkat Daerah		Kinerja Perangkat Daerah			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	1.000.000,00
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan	1.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 dan 24	orang/bulan dan Dokumen	101.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	1.000.000,00
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan	1.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 dan 24	orang/bulan dan Dokumen	8.174.442.840,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/bulan	
b	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	100.000.000,00
c	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	12	Dokumen	1.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59	Orang	2.661.946.484,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	59	Orang	2.661.946.484,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/bulan	8.073.442.840,00
b	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	100.000.000,00
c	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	12	Dokumen	1.000.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59	Orang	2.661.946.484,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	59	Orang	2.661.946.484,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket dan Laporan	1.130.000.000,00
a	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pe	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	12	Paket	60.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket dan Laporan	1.130.000.000,00
a	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pen	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	Paket	60.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	nerangan Bangunan Kantor		n Bangunan Kantor yang Disediakan			
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	200.000.000,00
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	220.000.000,00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000,00
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	450.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Jumlah paket Mebel, Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	65	Unit	1.189.700.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	erangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	200.000.000,00
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	220.000.000,00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000,00
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	450.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah paket Mebel, Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	65	Unit	1.189.700.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Daerah		Kendaraan Dinas Jabatan, Unit Peralatan dan Mesin Lainnya, Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	750.000.000,00
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	Unit	100.000.000,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit	239.700.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Dinas Jabatan, Unit Peralatan dan Mesin Lainnya, Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	750.000.000,00
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	Unit	100.000.000,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit	239.700.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	100.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	164.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	100.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			164.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30.000.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	49.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	30.000.000,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000,00
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	49.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	81	Unit	999.316.400,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	15	Unit	400.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	81	Unit	999.316.400,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	15	Unit	400.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dan dibayarkan Pajaknya			
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	25.000.000,00
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00
a	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	100.000.000,00
9	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2	Unit	474.316.400,00
a	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2	Unit	474.316.400,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	25.000.000,00
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00
a	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	100.000.000,00
9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	2	Unit	474.316.400,00
a	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	2	Unit	474.316.400,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN					5.047.375.000,00
			1. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	100	%	
			2. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100	%	
			3. Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN					5.047.375.000,00
			1. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	100	%	
			2. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100	%	
			3. Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Laporan Hasil Pengawasan Desa, Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil	170 dan 84	Laporan dan Dokumen	3.847.375.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Laporan Hasil Pengawasan Desa, Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	170 dan 84	Laporan dan Dokumen	3.847.375.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Reviu Laporan Kinerja			
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Laporan	353.535.000,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Laporan	690.664.000,00
c	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48	Laporan	1.000.000.000,00
d	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	303.176.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Laporan	353.535.000,00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Laporan	690.664.000,00
c	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48	Laporan	1.000.000.000,00
d	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	303.176.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
e	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60	Laporan	500.000.000,00
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84	Dokumen	1.000.000.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan	15	Laporan	1.200.000.000,00
a	Penanganan Penyelesaian	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	1	Laporan	600.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
e	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60	Laporan	500.000.000,00
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84	Dokumen	1.000.000.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan	15	Laporan	1.200.000.000,00
a	Penanganan Penyelesaian	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	1	Laporan	600.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	KerugianNegara/ Daerah		Negara/Daerah yang Ditangani			
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14	Laporan	600.000.000,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.752.625.000,00
			1.Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan,	100	%	3.752.625.000,00
			2. Presentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya,			
			3. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona			

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	KerugianNegara/Da erah		Negara/Daerah yang Ditangani			
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14	Laporan	600.000.000,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.752.625.000,00
			1.Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan,	100	%	3.752.625.000,00
			2. Presentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya,			
			3. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona			

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)			
			4. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	850.000.000,00
a	Perumusan Kebijakan Teknis	Kab. Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	1	Rekomendasi	850.000.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)			
			4. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomenda si	850.000.000,00
a	Perumusan Kebijakan Teknis di	Kab. Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	1	Rekomendas i	850.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	di Bidang Pengawasan		Pengawasan yang Disusun			
2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	96 dan 10	Perangkat Daerah dan Kegiatan	2.902.625.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
	Bidang Pengawasan		Pengawasan yang Disusun			
2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96 dan 10	Perangkat Daerah dan Kegiatan	2.902.625.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
			Reformasi Birokrasi			
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	perangkat daerah	1.000.000.000,00
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Kegiatan	1.302.625.000,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50	perangkat daerah	1.000.000.000,00
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	Kegiatan	1.302.625.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
N o	Urusan/Bidang UrusanPemerinta han Daerah, dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiata n/Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	perangkat daerah	600.000.000,00
						15.047.962.884,00

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang UrusanPemerintah an Daerah, dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	perangkat daerah	600.000.000,00
						23.121.405.724,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Inspektorat tidak mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.

Tabel 2.7
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2026

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Temanggung ada 6 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Penguatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Melalui SIMWASTITI di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat, Obyek Pemeriksaan	APBD	Pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat	Aplikasi Simwas	Penyelesaian Tindak Lanjut yang	Inspektorat Tahun 2025
2	Evakip	Tim Evakip Kabupaten	APBD	Evaluasi SAKIP dengan aplikasi Evakip	Aplikasi Evakip	Penilaian SAKIP mandiri oleh PD dan Penilaian SAKIP Evaluasi Tingkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Aplikasi EVAKIP oleh Tim Penilai Kabupaten	Inspektorat Tahun 2025
3	Penyusunan Petunjuk Teknis Reviu Barang	Tim 3 Inspektorat	APBD	Petunjuk Teknis Reviu Barang Milik Daerah	Petunjuk Teknis Reviu	Pelaksanaan Reviu BMD yang	Inspektorat Tahun 2025

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
	Milik Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Temanggung				Barang Milik Daerah	lebih sistematis dan seragam	
4	Pemanfaatan Media Digital Dalam Mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Kabupaten Temanggung	Tim 2 Inspektorat	APBD	Pengelolaan media digital pembangunan Zona Integritas melalui Linktree yang terintegrasi dengan media sosial Inspektorat.	Media digital (Linktree) Pembangunan Zona Integritas .	Meningkatnya kemudahan akses informasi, pemahaman, dan efektivitas sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bagi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Inspektorat Tahun 2025
5	Penyusunan Petunjuk Teknis Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung	Tim 3 Inspektorat	APBD	Petunjuk Teknis Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung	Petunjuk Teknis Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan Reviu Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung yang lebih sistematis dan seragam	Inspektorat Tahun 2025
6	Optimalisasi Ketepatan Waktu Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) Dengan Menggunakan Spreadsheet Di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Tim 4 Inspektorat	APBD	Penyusunan Kertas Kerja Audit	Kertas Kerja Audit menggunakan Spreadsheet	Penyusunan Kertas Kerja Audit dengan menggunakan spreadsheet menjadi lebih cepat dan terpantau	Inspektorat Tahun 2025

Sumber: Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2026

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Inspektorat Kabupaten Temanggung ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9
Daftar Penghargaan Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	10 Besar Instansi Terbaik Kategori Media On-Ground Activation (KPK RI);	Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Nasional	Inspektorat
2	10 Besar Instansi Terbaik Kategoro Media Konvensional (KPK RI);	Kemenpan RB	Nasional	Inspektorat
3	Juara I Kategori PPID Perangkat Daerah.	Pemkab Temanggung	Kabupaten	Inspektorat

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2026



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Pembangunan Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan”, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah;
2. Meningkatkan pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kinerja perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan :

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Inspektorat;
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pemerintah (SPIP)	Angka	3,15	3,25
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,006	3,012
	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal		Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,006	3,012
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,00	84,00
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	80,00	80,2

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	Persen	100	100
			Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persen	100	100
			Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	100
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	Persen	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persen	100	100
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Persen	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Persen	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2025-2029.

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung

Pagu anggaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 sebesar Rp. 23.121.405.724,00 didukung dengan 3 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan diseluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2027

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Inspektorat								23.121.405.724,00					21.560.991.228
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								23.121.405.724,00					21.560.991.228
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								23.121.405.724,00					21.560.991.228
														12.632.426.603
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 %			13.819.405.724,00			Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	12.632.426.603
6.01.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun				46 Dokumen dan Laporan	2.000.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	46 Dokumen dan Laporan	2.000.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Temanggung		13 Dokumen		1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	1.000.000,00
6.01.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Temanggung		33 Laporan		1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	1.000.000,00
6.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 orang per bulan dan 24 Dokumen	8.174.442.840,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang per bulan dan 24 Dokumen	7.516.191.937

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.02.00.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung		59 Orang/bulan		8.073.442.840,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	7.234.333.597
6.01.01.02.00.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Temanggung		12 Dokumen		100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000,00
6.01.01.02.00.00.03	Pelaksanaan Penatausahaa n danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD		Kab. Temanggung		12 Dokumen		1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00
6.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				59 Orang	2.661.946.484,00			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	2.000.000.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Temanggung		59 Orang		2.661.946.484,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	2.000.000.000,00
6.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket dan Laporan	1.130.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket dan Laporan	1.090.279.466,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.06.00.00.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000,00
6.01.01.2.06.00.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.000.000,00
6.01.01.2.06.00.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		220.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	220.000.000,00
6.01.01.2.06.00.01	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Temanggung		12 Laporan		200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	200.000.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
008														
6.01.01.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Temanggung		12 Laporan		450.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	410.279.466,00
6.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah paket Mebel, Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Unit Peralatan dan Mesin Lainnya, Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				65 Unit	1.189.700.000,00			Jumlah paket Mebel, Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Unit Peralatan dan Mesin Lainnya, Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	989.700.000,00
6.01.01.07.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kab. Temanggung		4 Unit		750.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	600.000.000,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001														
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Temanggung		17 Unit		100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	50.000.000,00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Temanggung		35 Unit		239.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	239.700.000,00
6.01.01.2.07.01010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kab. Temanggung		9 Unit		100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	100.000.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48 Laporan	164.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	137.938.800
6.01.01.02.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung		12 Laporan		30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00
6.01.01.02.08.00.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		Kab. Temanggung		12 Laporan		10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	10.000.000,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08.00.02			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Air dan Listrik yang Disediakan		
6.01.01.08.00.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Laporan		75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00
6.01.01.08.00.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Laporan		49.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.938.800
6.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dan				81 Unit	999.316.400,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	81 Unit	899.316.400,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, jjumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara								dan dibayarkan Pajaknya, dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, jjumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		
6.01.01.2.09.00.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Temanggung		15 Unit		400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	300.000.000,00
6.01.01.2.09.00.00.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Temanggung		30 Unit		25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	25.000.000,00
6.01.01.2.09.00.00.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Temanggung		34 Unit		100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	100.000.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. 09 .0 00 6			yang Dipelihara											
6. 01 .0 1. 2. 09 .0 00 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung		2 Unit		474.316.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Unit	474.316.400,00
6. 01 .0 2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N		1. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus),			100%			5.047.375.000,00			1. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus),	100%	5.123.779.137,00
			2. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP,			100%						2. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP,	100%	
			3. Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan			100%						3. Presentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tujuan Tertentu											
6. 01 .0 2. 2. 01	Penyelenggar aan Pengawasan Internal			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Laporan Hasil Pengawasan Desa, Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				170 Laporan dan 84 Dokumen	3.847.375.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Laporan Hasil Pengawasan Desa, Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	170 Laporan dan 84 Dokumen	3.888.092.772,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.02.01.00.00.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Temanggung		1 Laporan		353.535.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	353.092.772,00
6.01.02.01.00.00.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Temanggung		60 Laporan		690.664.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	696.824.000,00
6.01.02.01.00.00.03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Kab. Temanggung		48 Laporan		1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48 Laporan	1.000.000.000,00
6.01.02.01.00.01.0	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Kab. Temanggung		1 Laporan		303.176.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	303.176.000,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
004														
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Kab. Temanggung		60 Laporan		500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	535.000.000,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Temanggung		84 Dokumen		1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84 Dokumen	1.000.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan				15 laporan	1.200.000.000,00			Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan	15 laporan	1.235.686.365,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.02.00.01	Penanganan Penyelesaian KerugianNega ra/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daera h yang Ditangani		Kab. Temanggung		1 Laporan		600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	635.686.365,00
6.01.02.00.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Kab. Temanggung		14 Laporan		600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	14 Laporan	600.000.000,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	1.Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan,				100 %			3.752.625.000,00			1.Presentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan,	100 %	3.804.785.488,00
		2. Presentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya,				100 %			3.752.625.000,00			2. Presentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya,	100 %	3.804.785.488,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),				100 %						3. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),	100 %	
		4. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi				100 %						4. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100 %	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	850.000.000,00			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	850.000.000,00
6.01.03.2.01.0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		Kab. Temanggung		1 Rekomendasi		850.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	850.000.000,00

K O DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001														
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				96 Perangkat Daerah dan 10 Kegiatan	2.902.625.000,00			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96 Perangkat Daerah dan 10 Kegiatan	2.954.785.488,00

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja			Rencana Kerja Tahun 2027						Cata tan Pent ing	PRAKIRAAN MAJU 2028		
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaia Kinerja			Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03.02.00.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kab. Temanggung		50 perangkat daerah		1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50 perangkat daerah	1.000.000.000,00
6.01.03.02.00.03.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kab. Temanggung		10 Kegiatan		1.302.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Kegiatan	1.354.785.488,00
6.01.03.02.00.04.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kab. Temanggung		46 perangkat daerah		600.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46 perangkat daerah	600.000.000,00
J U M L A H									23.121.405.724,00					22.448.303.331,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Resntra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027, Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengalami perubahan.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	
	INSPEKTORAT DAERAH	23.121.405.724,00		INSPEKTORAT DAERAH	23.121.405.724,00	0
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.321.405.724,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.321.405.724,00	0
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	0
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	0
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.174.442.840,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.174.442.840,00	0
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.073.442.840,00	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.073.442.840,00	0
b	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	b	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	0
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	0
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.661.946.484,00	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.661.946.484,00	0
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.661.946.484,00	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.661.946.484,00	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.130.000.000,00	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.130.000.000,00	0
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	0
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000,00	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000,00	0
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	0
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	0
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.189.700.000,00	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.189.700.000,00	0
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750.000.000,00	a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750.000.000,00	0

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	
b	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	b	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	0
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.700.000,00	c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.700.000,00	0
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.000.000,00	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.000.000,00	0
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	0
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	0
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	0
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000,00	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000,00	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.316.400,00	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.316.400,00	0
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	0
b	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	b	Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	0
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0
a	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	a	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	0
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	0
a	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	a	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	474.316.400,00	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.047.375.000,00	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.047.375.000,00	0
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.847.375.000,00	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.847.375.000,00	0
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	353.535.000,00	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	353.535.000,00	0
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	690.664.000,00	b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	690.664.000,00	0
c	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000,00	c	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000,00	0
d	Reviu Laporan Keuangan	303.176.000,00	d	Reviu Laporan Keuangan	303.176.000,00	0
e	Pengawasan Desa	500.000.000,00	e	Pengawasan Desa	500.000.000,00	0

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+/-)
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDIKATIF	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000,00	f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000,00	0
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000,00	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.200.000.000,00	0
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000,00	a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000,00	0
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000,00	b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	600.000.000,00	0
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.752.625.000,00	III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.752.625.000,00	0
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	850.000.000,00	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	850.000.000,00	0
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	850.000.000,00	a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	850.000.000,00	0
2	Pendampingan dan Asistensi	2.902.625.000,00	2	Pendampingan dan Asistensi	2.902.625.000,00	0
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.000.000.000,00	a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.000.000.000,00	0
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.302.625.000,00	b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.302.625.000,00	0
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000,00	c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000,00	0
		23.121.405.724,00			23.121.405.724,00	0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
Unsur Pengawasan Pemerintahan					
36	Inspektorat Daerah				
1	Maturitas SPIP	level	2,979	3,15	INSPEKTORAT
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	2,42	3,006	INSPEKTORAT
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2,91	3,006	INSPEKTORAT

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025-2029

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN FUNGSI PENGAWASAN								
		1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 /Level 2/Level 3/Level 4/Level 5	Nilai	3	3	
		2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Level 1 /Level 2/Level 3/Level 4/Level 5	nilai	3	3	
		3	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	%	100	100	
				Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1				

Sumber: Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp.9.169.953.268 (42,92%) dari Pagu Anggaran sebesar Rp.21.363.472.593,00 realisasi Belanja Modal sebesar 81,27%, dari Pagu Anggaran Sebesar 1.187.355.000,00 terealisasi Rp.966.220.000,00,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 2.237.476.401 (9,95%) dari Anggaran sebesar Rp.22.472.405.722, dan realisasi Belanja Modal sebesar 0 rupiah(0%), dari anggaran Rp.650.000.000,- pada triwulan I belum terealisasi.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 23.121.405.724.- yang terdiri dari tiga (3) program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung

dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 15 Juli 2026.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si,
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005